

## PELEMBAGAAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) KOTA PADANG PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019

Wessy Juni Saputri

Jurusan Ilmu Politik, Fisip, Universitas Andalas, Padang

Email: [wessyunisa@gmail.com](mailto:wessyunisa@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas pelebagaan Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Padang pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019. Sebagai partai politik baru tetapi telah berhasil menjadi partai pemenang dua kali berturut-turut dalam Pileg Kota Padang. Peneliti ingin melihat kemenangan Partai Gerindra ini dari perspektif pelebagaan Partai Politik Randal dan Svasand dengan empat indikator pelebagaan (kesisteman organisasi, identitas nilai, otonomi kebijakan, dan reifikasi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Berdasarkan hasil temuan dan analisis menunjukkan bahwa Partai Gerindra Kota Padang belum memiliki tingkat pelebagaan yang bagus, dimana indikator pelebagaan menurut Randall & Svasand belum terpenuhi. Ditemukan bahwa Partai Gerindra Kota Padang terindikasi sebagai partai komando yang masih mendapat intervensi dominan dari pusat, selain itu peran dominan dari seorang Prabowo Subianto juga menjadikan Gerindra sebagai "personalistic party". Sehingga disimpulkan bahwa kemenangan Partai Gerindra Kota Padang pada Pileg Tahun 2019 bukanlah karena pelebagaan partai yang sudah bagus akan tetapi lebih cenderung karena dampak dari popularitas Prabowo dan basis pendukungnya yang besar di Sumatera Barat yang secara tidak langsung menjadi sebuah keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) bagi caleg-caleg Partai Gerindra Kota Padang sebagai partai pendukung Prabowo Subianto.

**Kata kunci:** Pelebagaan; Partai Gerindra; Pemilihan Legislatif

### Abstract

*This research discusses the institutionalization of the Padang City Indonesia Raya Movement Party in the 2019 Legislative Election as a new political party but has succeeded in becoming the winning party twice in a row in the Legislative Election of Padang City. The researcher wants to see the victory of the Gerindra Party from the perspective of institutionalizing the Randal and Svasand Political Party with four institutional indicators (organizational system, value identity, policy autonomy, and reification). This study used a qualitative method with a case study type. Based on the findings and analysis, it shows that the Gerindra Party in Padang City does not yet have a good level of institutionalization, where institutional indicators according to Randall & Svasand have not been fulfilled. It was found that the Padang City Gerindra Party was indicated as a commando party that still received dominant intervention from the center, besides that the dominant role of Prabowo Subianto also made Gerindra a "personalistic party". So it can be concluded that the victory of the Padang City Gerindra Party in the 2019 Pileg is not due to the already good institutionalization of the party but rather due to the impact of Prabowo's popularity and his large support base in West Sumatra which indirectly becomes a competitive advantage for candidates. The Gerindra Party candidate for Padang City as the party supporting Prabowo Subianto.*

**Keywords:** Institutionalization; Gerindra Party; Legislative Election

## 1. PENDAHULUAN

Keberadaan partai politik (parpol) sangat menentukan keberlangsungan sistem demokrasi di sebuah negara, tanpa adanya partai politik demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Ini dikarenakan partai politik merupakan suprastruktur yang harus dimiliki sebuah sistem pemerintahan agar dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang demokratis.<sup>1</sup> Sebagai bagian dari suprastruktur politik partai berperan menyeimbangkan serta mengontrol kinerja pemerintah agar terjadi keseimbangan dalam jalannya sistem politik. Partai politik itu sendiri merupakan organisasi yang bersifat dinamis, partai politik mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui proses yang panjang. Huntington mengungkapkan bahwa partai politik itu tumbuh dan berkembang melalui setidaknya empat tahapan penting, yakni faksionalisme, polarisasi, ekspansi, dan institusionalisasi.<sup>2</sup> Berdasarkan keempat tahapan perkembangan ini ia memosisikan pelebagaan sebagai tingkatan tertinggi dalam fase pertumbuhan dan perkembangan partai politik. Hal inilah yang menjadikan pentingnya tingkat pelebagaan bagi sebuah partai politik di negara demokrasi seperti Indonesia ini.

Lebih lanjut lagi Huntington mendefinisikan pelebagaan sebagai proses di mana organisasi dan prosedur mendapatkan nilai dan stabilitas.<sup>3</sup> Lebih lanjut pelebagaan partai politik yang dimaksud adalah sebuah proses pemantapan sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk suatu budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi.<sup>4</sup> Secara umum pelebagaan partai politik merujuk pada sejauh mana sebuah partai mampu mencapai kematangan secara internal dan eksternal sebagai sebuah organisasi demokratis. Sehingga sebuah partai politik agar mampu bertahan ditengah persaingan politik kontemporer haruslah memiliki tingkat pelebagaan yang baik.

Pertumbuhan parpol di Indonesia sendiri cukup pesat pasca bergulirnya Reformasi, hal ini dikarenakan suasana iklim politik yang semakin demokratis bersamaan dengan diberlakukannya sistem multipartai. Disatu sisi, sistem multi partai berdampak positif bagi Indonesia karena mampu mengakomodasi berbagai ideologi dan paham dari berbagai golongan, mengingat Indonesia adalah negara yang plural<sup>5</sup> dengan keanekaragaman warisan budaya bangsa. Tetapi disisi lain juga berdampak pada semakin tingginya tingkat

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridha T.R, Dilema Pelebagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan, *Cosmogov Vol.2 No.1*, April 2016, hlm. 160.

<sup>2</sup> Huntington dalam Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2011, hlm. 65.

<sup>3</sup> Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, London, 1973, hlm. 12.

<sup>4</sup> Teguh Irmansyah, Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Peran dan Fungsi Kelebagaan Partai Politik, *Jurnal RechtsVinding Vol.1 No.3* Desember 2012, hlm. 380.

<sup>5</sup> Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 9.

persaingan antar parpol dalam memperebutkan kekuasaan, sehingga berpotensi memunculkan persaingan politik yang tidak sehat diantara parpol terutama proses pelaksanaan kontestasi politik (Pemilu) itu sendiri.

Tingginya tingkat persaingan antar partai bukanlah satu-satunya rintangan yang dihadapi partai politik pasca Reformasi, terdapat masalah lain yakni menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik.<sup>6</sup> Banyaknya tantangan yang dihadapi menuntut partai politik harus mampu bertahan dengan menerapkan berbagai strategi agar tetap memperoleh tempat dihati masyarakat konstituen mereka, salah satunya yakni dengan meningkatkan pelembagaan partai. Bagi partai politik yang mampu beradaptasi maka akan terus tumbuh dan berkembang, sebaliknya partai yang tidak mampu mengimbangi persaingan politik yang ada pada akhirnya akan hilang terseleksi persaingan yang semakin ketat.

Salah satu partai politik baru yang muncul pasca Reformasi adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Walaupun tergolong partai politik baru Gerindra terus berkembang dan memiliki massa pendukung yang besar. Ini dibuktikan dengan hasil Pemilu Legislatif nasional Tahun 2009, 2014, dan 2019 dimana Gerindra senantiasa mengalami peningkatan perolehan kursi mereka di legislatif setiap periodenya. Hingga akhirnya pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 menjadi pencapaian tertinggi Partai Gerindra sejauh ini, dimana Partai Gerindra berada pada posisi tiga teratas dalam hasil perolehan kursi legislatif nasional. Kesuksesan Gerindra juga sejalan dengan hasil ditingkat lokal, Partai Gerindra juga mengalami peningkatan perolehan kursi legislatif yang cukup tinggi dibandingkan Pileg sebelumnya. Gerindra juga berhasil menjadi partai pemenang diberbagai daerah, salah satunya yakni Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, di sini Partai Gerindra berhasil memperoleh kursi terbanyak DPRD Kota Padang periode 2019-2024. Berikut adalah perbandingan perolehan kursi partai politik pada Pileg Kota Padang dalam beberapa periode:

---

<sup>6</sup> Nurlatipah Nasir, Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik DI Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik dengan Konstituen, *Jurnal Politik Proferik Vol. 04 No. 1* Tahun 2016, hlm. 3.

Figur 1

## Hasil Pileg Kota Padang Tahun 2009, 2014, 2019

No.	PartaiPolitik	Jumlah Kursi		
		2009	2014	2019
1	PKB	-	1	-
2	<b>Gerindra</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
3	PDI-P	1	3	3
4	Golkar	5	5	3
5	Nasdem	-	4	1
6	Berkarya	-	-	2
7	PKS	6	5	9
8	PPP	3	4	3
9	PAN	5	6	7
10	Hanura	4	5	-
11	Demokrat	17	5	6
12	PBB	2	1	-
Total		45	45	45

Sumber: Data Sekunder KPU Kota Padang diolah peneliti

Hasil ini menjadikan Gerindra sebagai partai politik pemenang Pileg Kota Padang dua kali berturut-turut, setelah sebelumnya pada Pileg 2014 Gerindra juga tampil sebagai partai pemenang dengan hasil perolehan suara berbeda tipis dengan PAN. Data-data ini semakin menegaskan bahwa Partai Gerindra terus mengalami perkembangan disetiap periode Pemilu walaupun tergolong sebagai partai baru di Indonesia. Kemenangan Partai Gerindra pada Pileg Kota Padang Tahun 2019 ini menimbulkan asumsi peneliti bahwa kemenangan Partai Gerindra Kota Padang tersebut dikarenakan tingkat pelebagaan partai yang sudah baik. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh mengenai pelebagaan yang dimiliki Partai Gerindra Kota Padang sebagai partai politik pemenang Pileg Tahun 2019.

Penelitian ini menjadi baru sebab jika dilihat pada penelitian yang telah ada sebelumnya isu yang dikaji terkait dengan pelebagaan partai politik ini rata-rata berangkat dari isu permasalahan yang terdapat dalam internal sebuah partai politik, dari sanalah kajian pelebagaan dimulai. Lihat saja penelitian terdahulu dari Muhammad Ridha T.R.<sup>7</sup> yang melihat keterkaitan antara pelebagaan Partai Golkar dengan adanya fenomena politik klan di Indonesia. Selain itu ada juga penelitian terdahulu terkait pelebagaan partai yaitu penelitian Abu Bakar<sup>8</sup> yang berangkat dari isu fenomena politik dinasti.

<sup>7</sup> Muhammad Ridha T.R, Dilema Pelebagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan, *Cosmogov Vol.2.No. 1*, April 2016.

<sup>8</sup> Abu Bakar, Politik Dinasti dan Pelebagaan Partai Politik: Pengalaman DPC PDIP dan Keluarga Banteng di Kepulauan Selayar, *Al- daulah Vol. 1 No. 1* Juni 2013.

Sedangkan untuk trend penelitian pelebagaan partai politik khususnya di Jurusan Ilmu Politik Unand rata-rata merujuk kepada isu-isu dominasi politik yang berusaha dilihat dari sudut pandang pelebagaan itu sendiri. Seperti penelitian Oka Darmi Dwi Kaypama<sup>9</sup> dan Biwa Okta Brando.<sup>10</sup> Sedangkan penelitian sekarang berusaha mempertanyakan apakah kemenangan yang di peroleh sebuah partai politik merupakan faktor dari tingkat pelebagaan partai yang sudah baik atau tidak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelebagaan Partai Gerindra Kota Padang sebagai partai pemenang pada Pemilu Legislatif Tahun 2019.

**Pelebagaan Partai Politik**

Randall dan Svasand memahami pelebagaan sebagai proses pematapan partai politik dalam aspek struktural dan kultural yang mana aspek tersebut terwujud dalam pola prilaku serta dalam sikap dan budaya. Berdasarkan hal ini Randall dan Svasand mengemukakan bahwa terdapat empat dimensi dalam melihat pelebagaan partai politik, yaitu *Systemness* (kesisteman organisasi), kedua *Value Infusion* (identitas nilai), ketiga *Decisional Autonomy* (otonomi kebijakan) dan terakhir *Reification* (reifikasi).<sup>11</sup> Indikator dalam melihat pelebagaan partai politik ini diperoleh dari hasil persilangan dua aspek dalam proses pelebagaan, yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural, lihat tabel berikut:

**Figur 2 Pelebagaan Partai Politik Randal & Svasand**

	<b>Internal</b>	<b>External</b>
<b>Structural</b>	<i>Systemness</i>	<i>Decisional autonomy</i>
<b>Attitudinal</b>	<i>Value infusion</i>	<i>Reification</i>

*Sumber: Vicky Randall & Lars Svasand, 2002*

<sup>9</sup> Lihat Okadarmi Dwi Kaypama, Dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014, *Skripsi* tidak dipublikasikan, 2019, FISIP Universitas Andalas.

<sup>10</sup> Lihat Biwa Okta Brando, Dominasi Partai Golkar di Kota Solok Periode 1999-2004, *Skripsi* tidak dipublikasikan, FISIP Universitas Andalas, 2017.

<sup>11</sup> Vicky Randall dan Lars Svasand, Party Institutionalizations in New Democracies, *Sage Publications Vol.8 No.1* Tahun 2002, hlm. 13.

### 1) Kesisteman (*Systemness*)

Aspek kesisteman dalam melihat pelembagaan partai politik berhubungan dengan proses pelaksanaan fungsi yang seharusnya dijalankan partai yang dijalankan sesuai urutan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang telah disepakati dan ditetapkan partai politik sebelumnya, di mana dalam hal ini adalah AD dan ART.

### 2) Identitas Nilai (*Value infusion*)

Penyerapan nilai atau identitas nilai partai politik didasarkan atas ideologi dan platform partai, basis sosial pendukungnya dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan partai.

### 3) Otonomi Kebijakan (*Decisional Autonomy*)

Otonomi Kebijakan mengacu kepada hubungan partai politik dengan ekosistem yang berada di luar partai, baik itu sumber otoritas seperti penguasa dan pemerintah atau sumber dana seperti pengusaha dan lain-lain, ataupun hubungan partai dengan sumber dukungan massa seperti organisasi kemasyarakatan.

### 4) Reifikasi (*Reification*)

Reifikasi berkaitan dengan pengetahuan publik tentang Partai Politik. Hal ini merujuk pada bagaimana sebuah partai mampu menanamkan ideologi, nilai-nilai, serta platform partai di masyarakat. Reifikasi berkaitan dengan bagaimana partai memberikan citra kepada publik sehingga menciptakan kesetiaan konstituen dalam memberikan dukungan kepada partai dalam jangka waktu yang panjang.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk nantinya menjelaskan bagaimana pelembagaan Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah studi kasus instrumental (*case study instrumental*), jenis penelitian ini digunakan karena penelitian ini berangkat dari gejala-gejala (fenomena) yang sifatnya unik dan tidak sering terjadi dalam dinamika kehidupan politik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*depth interview*) dan dokumentasi. Kemudian yang menjadi objek penelitian adalah DPC Partai Gerindra Kota Padang. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh di lapangan peneliti menggunakan triangulasi akademisi/pakar.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil pembahasan terkait pelembagaan Partai Gerindra Kota Padang sebagai partai pemenang pada pemilihan legislatif Tahun 2019 berdasarkan indikator pelembagaan partai politik menurut Vicky Randall dan Lars Svasand:

#### 1) **Kesisteman Organisasi (*Systemness*)**

Pada bagian aspek kesisteman organisasi ini terdapat hal-hal yang sudah sesuai dengan indikator terlembaganya sebuah partai politik dan ada pula hal-hal yang masih belum tercapai oleh Partai Gerindra Kota Padang menurut aspek tersebut. Indikator-indikator yang hampir tercapai ini adalah yang pertama dari segi manajemen SDM termasuk di dalamnya proses rekrutmen anggota serta proses seleksi bakal calon legislatif yang sudah terlaksana sesuai dengan panduan AD/ART. Kemudian untuk kejelasan sumber keuangan Partai Gerindra Kota Padang juga telah transparan diungkapkan, lalu yang terakhir partai ini juga telah memiliki sistem manajemen konflik yang di dasarkan atas nilai-nilai demokrasi serta adanya mahkamah partai yang bertugas menangani konflik.

Lalu hal-hal yang menurut analisis peneliti belum sejalan dengan indikator-indikator pelembagaan partai adalah terletak pada bagian kepemimpinan partai di daerah yang masih lemah, hal ini dikarenakan ketergantungan partai terhadap putusan pusat yang sifatnya mengikat, sehingga peneliti mengatakan bahwa Partai Gerindra sebagai “partai komando”. Kuatnya intervensi pusat juga melemahkan kepemimpinan partai karena pemimpin partai sepenuhnya mengikuti keputusan-keputusan pusat terkait proses pengelolaan partai terkhusus lagi bagi Partai Gerindra Kota Padang yang berkedudukan di daerah, keadaan ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi belum diterapkan dalam tubuh partai.

#### 2) **Identitas Nilai (*Value infusion*)**

Untuk basis pendukungnya sendiri Partai Gerindra dalam pergerakannya sehari-hari memiliki interaksi yang kuat dengan kelompok pedagang khususnya Pedagang Pasar rasa sehingga kelompok ini menjadi salah satu basis pendukung utama Gerindra di Kota Padang. Walaupun menjalin interaksi yang intensif dengan kelompok pedagang di Kota Padang akan tetapi peneliti tidak menemukan data lain yang memperkuat asumsi bahwa kelompok ini menyatakan dukungan penuh mereka kepada Gerindra Kota Padang. Sehingga pengakaran partai ini ditengah masyarakat masih dipertanyakan. Sedangkan untuk proses internalisasi nilai-nilai kepartaian kepada anggotanya sendiri Partai Gerindra Kota Padang juga telah memiliki sistem kaderisasi yang bersifat continue/berkelanjutan baik itu di tingkat daerah (dalam hal ini DPC dan DPD) maupun di tingkat pusat.

Sedangkan untuk indikator yang belum tercapai oleh Gerindra Kota Padang pada aspek identitas nilai ini adalah masih besarnya peluang untuk terjadinya klientalisme dalam internal partai, serta loyalitas anggota partai masih belum kuat sebab balik lagi bahwa partai ini adalah partai komando yang bergantung pada ketetapan pusat. Sehingga loby-loby politik untuk kepentingan pribadi masih mungkin terjadi, dan yang terakhir adalah masih besarnya pemanfaatan simbol-simbol ketokohan dalam rangka penetrasi di tengah masyarakat, sehingga menjadikan Gerindra memiliki ketergantungan pada seorang tokoh sentral seperti Prabowo Subianto.

### **3) Otonomi Kebijakan (*Decisional Autonomy*)**

Pada bagian otonomi kebijakan ini peneliti melihat masih banyak indikator-indikator yang belum terpenuhi oleh Partai Gerindra Kota Padang. Hal ini dikarenakan dampak dari sistem komando yang berjalan dalam tubuh Partai Gerindra sehingga akhirnya juga berbuntut bagi partai-partai yang berkedudukan di daerah. Dampak-dampak dari sistem komando ini terlihat dari ketergantungan partai terhadap putusan pusat sehingga partai di daerah tidak mandiri dalam menjalankan organisasinya, sedangkan Randall dan Svasand menekankan bahwa partai harus mandiri dan terbebas dari oligarki elite dalam menjalankan organisasi mereka.

Hal ini meliputi pengambilan keputusan serta kebijakan-kebijakan internal yang seharusnya menjadi hak struktural Partai Gerindra Kota Padang itu sendiri. Sekalipun pada aspek otonomi kebijakan ini Partai Gerindra Kota Padang memiliki banyak kekurangan tetapi ada indikator yang juga hampir terpenuhi, yaitu hubungan yang di jalin partai dengan aktor luar tidak serta merta mempengaruhi keputusan internal partai, disini terlihat bahwa Partai Gerindra Kota Padang berusaha menjadi sebuah organisasi yang independen.

### **4) Reifikasi (*Reification*)**

Sedangkan pada aspek reifikasi Partai Gerindra Kota Padang telah memiliki berbagai kegiatan dalam rangka memposisikan dan membranding dirinya sebagai organisasi yang bernilai positif di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dengan keaktifan Partai Gerindra Kota Padang untuk terlibat dalam aksi kemanusiaan dan juga menjalankan fungsinya sebagai penghimpun aspirasi masyarakat seperti yang telah peneliti jelaskan secara rinci pada BAB V. Akan tetapi di sini Partai Gerindra juga masih minus dalam hal implementasi platform partai, dimana Gerindra Kota Padang masih membranding dirinya dengan simbol-simbol ketokohan Prabowo Subianto sebagai nilai jual utama. Dalam aspek kesisteman dikatakan partai yang memiliki ketergantungan kepada aktor tertentu atau biasa disebut dengan partai personalistik memiliki tingkat pelebagaan yang lemah.

Berdasarkan keempat indikator pelebagaan partai politik yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat beberapa poin yang peneliti garis bawahi terkait pelebagaan yang

dimiliki Partai Gerindra Kota Padang. Pertama, Partai Gerindra Kota Padang dalam proses penentuan kebijakan-kebijakan strategis dalam internal Partai Gerindra Kota Padang masih terdapat intervensi yang cukup kuat dari pusat, sehingga mengindikasikan bahwa Partai Gerindra sebagai “Partai Komando”. Keputusan penting yang diambil beserta haluan pergerakan partai semuanya bersumber pada ketetapan-ketetapan dari pusat. Sehingga DPC Gerindra Kota Padang yang berkedudukan ditingkat DPC dalam menjalankan organisasinya berpedoman atas komando pusat, apabila pusat telah memutuskan maka struktural partai dibawahnya harus tunduk dengan keputusan ini. Adanya intervensi yang terlalu dalam dari struktural partai yang lebih tinggi dalam hal penentuan kebijakan-kebijakan sentral dalam internal Partai Gerindra Kota Padang ini terlihat sangat jelas dalam penunjukan orang-orang yang akan mengisi jabatan strategis dalam partai. Seperti halnya dalam penunjukan untuk jabatan ketua DPC, DPD maupun jabatan untuk Ketua DPRD karena Gerindra adalah partai pemenang saat Pileg Tahun 2019.

Selanjutnya, poin kedua yang menjadi sorotan peneliti dalam pelebagaan Partai Gerindra Kota Padang sebagai partai pemenang dalam Pileg Tahun 2019 adalah besarnya peran ketokohan seorang Prabowo Subianto sebagai mesin politik utama Partai Gerindra serta memiliki andil yang besar dalam menentukan garis besar haluan Partai. Peneliti berpendapat bahwa Partai Gerindra adalah partai personalistik, yakni tipe partai politik yang cenderung merepresentasikan seorang tokoh sentral sebagai mesin politik utama partai. Apabila berbicara mengenai pelebagaan partai politik partai dengan ciri-ciri seperti ini biasanya memiliki tingkat pelebagaan yang rendah karena partai memiliki kecenderungan untuk menjalankan organisasinya dengan tujuan mengakomodasi kepentingan tokoh tersebut.

Besarnya andil Prabowo dalam menentukan haluan partai juga berlaku sama bagi partai yang berkedudukan di daerah baik itu tingkat DPD maupun DPC, tidak terkecuali Gerindra Kota Padang sendiri. Ideologi kepartaian dalam tubuh Partai Gerindra banyak bersumber dari sosok Prabowo yang kental dengan jiwa militernya, salah satunya yaitu sistem komando yang telah dibahas sebelumnya. Ketergantungan Gerindra terhadap tokoh Prabowo di satu sisi memang mengindikasikan bahwa Partai Gerindra belum memiliki tingkat pelebagaan yang baik. Akan tetapi di sisi lain ketokohan seorang Prabowo ini juga menjadi keuntungan tersendiri bagi caleg-caleg Partai Gerindra Kota Padang pada saat Pileg Tahun 2019. Ketokohan Prabowo menjadi keuntungan kompetitif bagi mereka sebab caleg-caleg ini akan lebih mudah dalam melakukan penetrasi di tengah masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol partai dan juga ketokohan Prabowo ini.

Sehingga inilah yang lebih cenderung menjadi faktor utama dibalik kemenangan Partai Gerindra pada Pemilihan Legislatif Kota Padang Tahun 2019 dibandingkan dengan pelebagaan yang Gerindra miliki. Akan tetapi tetap saja bila dilihat dari aspek

pelembagaan partai politik ketergantungan sebuah partai terhadap tokoh tertentu bukanlah hal positif, sebab popularitas tokoh tersebut tentu tidak akan bertahan selamanya, ada kalanya tokoh tersebut sudah tidak mampu lagi menjadi mesin penggerak partai. Oleh sebab itu sebuah partai politik yang terlembaga harus memiliki regenerasi yang bisa tercapai apabila partai memiliki sistem kaderisasi yang bagus sehingga mampu menghasilkan kader-kader baru yang berkualitas sebagai generasi penerus partai di masa depan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti sampaikan pada bagian pembahasan peneliti menarik kesimpulan bahwa DPC Partai Gerindra Kota Padang masih belum bisa dikatakan sebagai sebuah partai yang terlembaga berdasarkan pada keempat aspek pelembagaan menurut Randall dan Svasand. Terdapat dua point utama yang dapat disimpulkan dalam pelembagaan Partai Gerindra Kota Padang ini.

- 1) Pertama, Partai Gerindra Kota Padang dalam proses penentuan kebijakan-kebijakan strategis dalam internal Partai Gerindra Kota Padang masih terdapat intervensi yang cukup kuat dari pusat, sehingga mengindikasikan bahwa Partai Gerindra sebagai “Partai Komando”.
- 2) Kedua, besarnya peran ketokohan Prabowo Subianto sebagai mesin politik utama Partai serta memiliki andil besar dalam menentukan garis besar haluan Partai. Sehingga Partai Gerindra terindikasi sebagai “*personalistic party*”.

Partai yang terlembaga menurut Randall dan Svasand seharusnya adalah partai politik yang menjalankan roda organisasinya sesuai dengan konstitusi partai yang berlaku (AD/ART) serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis. Selain itu pada partai Gerindra peran seorang tokoh sentral juga masih sangat kuat yakni Prabowo dalam menentukan garis haluan partai, sehingga menjadi Gerindra identik sebagai *personalistic party*. Sedangkan untuk kedua aspek lainnya yakni identitas nilai dan reifikasi sudah lebih banyak indikator pelembagaan yang telah terpenuhi oleh Partai Gerindra Kota Padang, walaupun masih ada beberapa kekurangan pada masing-masing aspek yang ada.

Berdasarkan deskripsi dari masing-masing indikator pelembagaan partai politik menurut Randall dan Svasand di atas maka peneliti juga menyimpulkan bahwa tingkat pelembagaan yang dimiliki Gerindra Kota Padang bukanlah faktor dibalik kemenangan Gerindra Kota Padang pada Pileg Tahun 2019. Akan tetapi dalam konteks Partai Gerindra Kota Padang saat pemilihan legislatif tahun 2019 ketokohan Prabowo yang sangat melekat dengan Partai Gerindra menjadi sebuah keuntungan kompetitif bagi caleg-caleg yang berasal dari Partai Gerindra. Sehingga mereka secara tidak langsung akan lebih mudah

diterima di tengah masyarakat dengan memanfaatkan politik simbol dari ketokohan sosok Prabowo Subianto tadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- D. Kaypama, Oka. 2019. "Dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014". *Skripsi* tidak dipublikasikan. Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Efriza. 2014. *Studi Parlemen: Sejarah, Konsep dan Lanskap Politik Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Fiona, Ulla dan Dirk Tomsa. 2017. "Parties and Factions in Indonesia: The Effect of Historical Legacies and Institutional Engineering" dalam ISEAS Yusof Ishak Institute.
- Firmanzah. 2007. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Huntington, Samuel. 1973. *Political Order in Changing Societies*. New York: Yale University Press.
- Irmansyah, Teguh. 2012. "Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik" dalam *Jurnal RechtsVinding* Vol 1 No 3 (hlm. 375-395).
- Kambo, Gustiana A. 2017. "Institutionalization Process Dymension of Political Parties: Study of Institutionalization of Golkar Party in South Sulawesi Province" dalam *Journal of Society and Governance* Volume 1 No 2 (hlm. 77-87).
- Mujani, Saiful, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi. 2011. *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde-Baru*. Bandung: Mizan.
- Nasir, Nurlatipah. "Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik DI Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik dengan Konstituen" dalam *Jurnal Politik Proferik* Vol 04 No 1 (hlm. 37-65).
- Newton, Kenneth dan Jan W. Van Deth. 2016. *Perbandingan Sistem Politik Teori dan Fakta*. Bandung: Nusa Media.
- Nurdiansyah, Fahmi. 2018. "Marketing Politik DPP Partai Gerindra Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014" dalam *Jurnal Ilmu Politik* Volume 9 Nomor 1 (hlm. 60-70).
- Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- O. Brando, Biwa. 2017. "Dominasi Politik Partai Golkar di Kota Solok Periode 1999-2014". *Skripsi* tidak dipublikasikan. Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Pamungkas, Sigit. 2012. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Randall, Vicky dan Lars Svasand. 2002. "Party Institutionalizations in New Democracies" dalam Sage Publications Vol 8 No 1 (hlm. 5-29).
- Rowdotusya'adah. 2018. "Pelebagaan Partai Politik dan Fraksi Intra-Partai: Studi Tentang Kemunculan Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat". *Skripsi* tidak dipublikasikan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- T.R, Muhammad Ridha. 2016. "Dilema Pelebagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan" dalam Jurnal Cosmogov Vol 2 No 1 (hlm. 160-182).
- Y. Akbar, Audrah. 2014. "Pelebagaan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sulawesi Selatan Periode 2013-2018". *Skripsi* tidak dipublikasikan. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Yunus, Nur Rohim. 2018. "Coattail Effect Pada Ajang Pemilihan Umum Presiden 2019" dalam Jurnal Adalah Volume 2 Nomor 8e (hlm. 79-80).